



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**2024
EDITION**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PASER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandate untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Paser termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, 28 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Laporan	
A.1. Maksud Laporan	5
A.2. Tujuan Laporan	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	11
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	19
A.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	24
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	28
C. Realisasi Anggaran	38
D. Analisa Efisiensi	46
E. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022	46
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran – Saran	49
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Kabupaten Paser.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Analisa terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan nilai rata – rata **106,71 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Paser. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Paser.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

a. *Sekretaris Daerah;*

b. *Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :*

1. *Bagian Tata Pemerintahan*
2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
3. *Bagian Hukum*
4. *Bagian Kerja Sama*

c. *Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :*

1. *Bagian Perekonomian*
2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
4. *Bagian Sumber Daya Alam*

d. *Asisten Administrasi Umum yang membawahi :*

1. *Bagian Umum*
2. *Bagian Organisasi*
3. *Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
4. *Bagian Perencanaan dan Keuangan*

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP

ANDI AZIS
 NIP.19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,
 ttd
 FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I

Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Ketidak jelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan, Bagian dan ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.</i>
2	Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.	<i>Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan kurang kemampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan / tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang</i>

		<i>dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya.</i>
--	--	---

Sumber : RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022-2026

D. ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai PD yang mempunyai tugas pokok *melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*UNRESOLVED MATTERS*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD (Focus Grup Discussion) atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser **adalah *Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.***

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Menjelaskan Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Urusan dan Program yang diampu,

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian misi Kabupaten Paser yang tercantum pada RPJMD yaitu Misi kedua ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.*** Tujuan dari misi kedua tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik*** diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
5. Meningkatkan kerjasama daerah dalam pembangunan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebanyak 3 (*Tiga*) indikator pada tahun 2023. Pada Bulan Desember hasil review dari inspektorat Sekretariat Daerah Merevisi Sasaran dan Insikatornya sehingga pada tahun 2024 Sekretariat memiliki sebanyak 5 (*lima*) indikator.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Setda Kabupaten Paser

No.	Indikator		Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	2022		2023		2024		2025		2026		
			Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Rata-rata Nilai (Predikat) AKIP Perangkat Daerah	0	B (70)	0	B (70)		BB (71)		BB (71)		A (81)	A
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum						85		90		95	95
2	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	85		85			90		90		95	95
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan		85				90		90		95	95

3	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	80		80			85		90		95	95
---	--	--	----	--	----	--	--	----	--	----	--	----	----

Tabel 2.2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Defenisi Operasional	Formulasi/Penjelasan	Sumber Data
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu			
3	4	5			
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah nilai AKIP seluruh Perangkat daerah dibagi Jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	LHE SAKIP dari inspektorat	Renja Sekretariat Daerah 2024
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Hasil Survei Kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan	Survei mandiri	Renja Sekretariat Daerah 2024
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan adalah persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%	Renja Sekretariat Daerah 2024
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan adalah persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	Renja Sekretariat Daerah 2024
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan adalah persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan dikalikan 100%	Renja Sekretariat Daerah 2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026 yang telah direvisi, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah menetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB ()
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	85
2	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	90
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang Kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	90
3	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	85

Tabel 2.4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perekonomian Dan Pembangunan		6.738.935.695
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.717.878.688
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.039.551.594
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.286.419.899
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	695.085.514
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		33.784.711.881
		Administrasi Tata Pemerintahan	2.801.675.791
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.995.862.120
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	28.370.564.501
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	616.609.469

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		215.861.284.333
		Penataan Organisasi	1.762.867.759
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380.108.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.447.897.081
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.296.751.062
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.441.464.020
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.661.647.918
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.971.789.666
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.355.980
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.716.466.846
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.621.936.001
		TOTAL	

Tabel 2.5
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	85	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	6.738.935.695	
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	100	3.717.878.688	
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	100	1.039.551.594	
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	100	1.286.419.899	
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	100	695.085.514	
2	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	90	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti 2. Nilai LPPD	100 2,75	100 2,75	33.784.711.881	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	90	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	100	2.801.675.791	
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	100	1.995.862.120	
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	100	28.370.564.501	
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	100	616.609.469	
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	74	215.861.284.333	
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	72 (85)	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	100	1.762.867.759	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	380.108.000	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	50.447.897.081	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	87.296.751.062	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	29.441.464.020	
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	100	2.661.647.918	
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	100	1.371.936.001	
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	6.971.789.666	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	100	560.355.980	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	33.716.466.846	
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	100	2.621.936.001	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar 77,02 dengan kategori BB, >70-80, Sangat Baik, dengan interpretasi "Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator."

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP 2023 memperoleh nilai total sebesar 69,65 kategori B. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi dan perbandingan dengan hasil sebelumnya sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
		2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	22,14	26,22
Pengukuran Kinerja	30	20,21	22,93
Pelaporan Kinerja	15	10,57	10,52
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,40	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,32	77,17
Kategori		BB	BB

Terdapat 1 (satu) komponen Pelaporan Kinerja yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan masih perlu upaya perbaikan dari aspek Kualitas dan Pemanfaatan. Sedangkan pada komponen Perencanaan Kinerja,"dan Pengukuran Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah baik dan perlu dipertahankan pada tahun berikutnya.

Tindak Lanjut LHE Tahun Sebelumnya

Terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 dimana terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan APIP telah ditindak lanjuti antara lain:berikut ;

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Bukti (evidence)
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dalam hal kesesuaian dan keselarasan dokumen pohon kinerja, Penjenjangan kinerja (Cascading) telah menerapkan kerangka logis, dan potensi hubungan aktivitas kinerja antara bidang tugas/fungsi lain (Crosscutting)	Melakukan Koordinasi dengan Bagian Organisasi	September Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pohon Kinerja 2023 2. Cascading 2023 3. Crosscutting 2023 4. Berita Acara Koordinasi dengan Organisasi 5. Dokumentasi 6. Daftar Hadir Koordinasi dengan Organisasi
2	<p>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengkoordinir evaluasi internal berkala atau setiap 3 (tiga) Bulan, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2024 secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan 2) Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024 dan melaporkan pelaksanaan evaluasi yang memuat analisa pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja berkenaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengukuran atas capaian rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Sekretaris dan Masing-masing Kepala Bidang 	Mengkoordinir Rapat Monev Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah per Triwulan	Triwulan I-IV Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Monev Pertriwulan 2. Laporan hasil Monev Triwulan I,II,III dan IV 3. Perjanjian Kinerja 2024 4. Rencana Aksi 2024 5. Undangan Rapat Pertriwulan 6. Dokumentasi Rapat Pertriwulan 7. Daftar Hadir Rapat 8. Notulen Rapat Monev
3	Menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh kepala bagian untuk mendokumentasikan sumber data kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan rencana aksi masing-masing	Nota Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah	Triwulan I-IV Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Dinas dilingkungan sekretariat Daerah 2. Perjanjian Kinerja 2024 3. Rencana Aksi Setda 2024 4. Dokumentasi sumber data kinerja per triwulan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Bukti (evidence)
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengkoordinis pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024 dengan melibatkan seluruh kepala bagian dan mendokumentasikan dokumen rapat dimaksud	Mengkoordinir rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024	Triwulan I 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja 2024 di Lingkungan Setda 2. Dokumentasi Rapat 3. Daftar Hadir Rapat 4. Draf LKJiP 2024
5	<p>Memerintahkan secara tertulis kepada pejabat penyusun laporan kinerja tahun 2024, agar dalam laporan menyajikan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan realisasi tahun tahun sebelumnya yang dilengkapi analisis capaiannya b. Perbandingan realisasi kinerja dengan hasil bechmarking pada Sekretariat Daerah di Kabupaten atau Kota yang lain analisis faktor pendorong keberhasilan dan/atau penghambat pencapaian kinerja 	Surat Penunjukkan Pejabat dari Sekretaris Daerah	Triwulan I 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penunjukkan Pejabat Penyusun LKJiP 2024 2. Draf LKJiP 2024 3. LKJiP refrensi dari kota lain
6	Menyusun Pedoman dan mekanisme pemberian reward dan punishment atas kinerja pegawai yang ditetapkan dengan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Paser	Menyusun Pedoman dan Mekanisme pemberian reward dan Punishment atas kinerja pegawai yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Triwulan IV 2024 s/d Triwulan I Tahun 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusunan Pedoman dan Mekanisme Reward dan Punishment 2. Perbup Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Pegawai 3. Perbup Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Pedoman Penyusunan Reward dan Punishment atas kinerja Pegawai dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning

4	<40%	Tidak Berhasil	Merah
---	------	----------------	-------

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh *Sekretariat Daerah Kabupaten Paser* dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu		Satuan	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah nilai AKIP seluruh Perangkat daerah dibagi Jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	Nilai	BB (71)	B (68,95)	97,11	
			Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Hasil Survei Kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan					
Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasiliasi	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangannya	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/suredaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%	%	90	117,32	130,36	

			Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangannya	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	%	90	91,31	101,48	
Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangannya	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan dikalikan 100%	%	85	87,22	102,61	
RATA-RATA PENCAPAIAN IKU								106,71	Berhasil

Untuk Tahun 2004 hasil Reviu dokumen perencanaan oleh inspektorat disarankan untuk merevisi Dokumen Perencanaan, untuk indikator **Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah** diukur dengan rata rata nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tahun 2023 oleh inspektorat, dan indikator **Indeks kepuasan layanan administrasi umum** di lakukan pengukuran dengan hasil survey kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan Capaian Kinerja ini dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sedangkan **Persentase hasil koordinasi**

kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah yang di buat tahun 2024 **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan** dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah yang dibuat pada tahun 2024 Capaian Kinerja ini Dilaksanakan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan** dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah TA. 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 sebanyak 5 indikator mendapatkan kriteria “SangatBerhasil” (capaian diatas 85% - 100%).Realisasi indikator kinerja utama di atas 100%.

Tabel 3.3
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Capaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79,17	BB	79,49	BB
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	76,08	BB	77,65	BB
3	Sekretariat Daerah Kab. Paser	70,32	BB	77,17	BB
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	68,50	B	77,02	BB
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	76,86	BB	75,75	BB
6	Dinas Perhubungan	73,51	BB	74,67	BB
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	72,25	BB	74,44	BB
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	63,77	B	74,40	BB
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,17	BB	72,89	BB
10	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	70,04	BB	72,73	BB
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	67,93	B	72,69	BB
12	Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	65,22	B	72,58	BB
13	Badan Pendapatan Daerah	70,68	BB	71,91	BB
14	Bdan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	65,16	B	71,51	BB
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69,59	B	71,20	BB
16	Dinas Ketahanan Pangan	70,51	BB	70,36	BB
17	Kec. Longkali	60,05	B	69,96	B
18	Dinas Pengabdialian Penduduk Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65,83	B	69,93	B
19	Sekretariat DPRD	63,60	B	69,88	B
20	Kec. Muara Samu	68,07	B	69,87	B
21	Dinas Sosial	69,68	B	69,76	B
22	Dinas Perikanan	73,08	BB	69,65	B
23	Kec. Long Ikius	63,99	B	69,24	B
24	Dinas Kesehatan	68,94	B	69,11	B
25	Dinas Lingkungan Hidup	67,29	B	68,94	B
26	Inspektorat	68,75	B	67,89	B
27	Satuan Polisi Pamong Praja	63,70	B	67,74	B
28	Kec. Tanah Grogot	64,50	B	65,78	B
29	Kec. Tanjung Harapan	61,20	B	65,53	B

30	Kec. Batu Sopang	62,03	B	64,91	B
31	Kec. Paser Belengkong	62,08	B	64,76	B
32	Badan Penanggulangan bendacan Daerah	62,77	B	64,40	B
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	63,59	B	63,42	B
34	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	70,18	BB	62,65	B
35	Kec. Kuaro	60,10	B	62,63	B
36	Dinas Pemadam Kebakaran	60,48	B	61,84	B
37	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	76,50	BB	61,18	B
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61,72	B	60,61	B
39	Kec. Muara Komam	65,87	B	60,38	B
40	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	60,58	B	60,31	B
41	Kecamatan Batu Engau	60,10	B	60,29	B
Nilai Rata Rata		67,35	B	68,95	B

Indeks kepuasan layanan administrasi umum 2024

Responden	Target Kinerja Indeks Pelayanan (Perjanjian Kinerja)	Indeks Pelayanan	Capaian Kinerja (%)
87	85	86,72	102,02

Tabel 3.4

PERSENTASE HASIL KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	85	87,22	102,61
Rata Rata Capaian Kinerja				102,61

Tabel 3.5

- 1. PERSENTASE HASIL KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN**
- 2. PERSENTASE HASIL KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KESRA YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	117,32	130,36
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	91,31	101,46
Rata Rata Capaian Kinerja				115,91

B.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2022 - 2026. Dikarenakan pada akhir tahun 2023 dokumen perencanaan Sekretariat Daerah di evaluasi oleh Inspektorat dan hasil dari evaluasi tersebut di sarankan oleh inpektorat untuk mereviuw Dokumen Perencanaan Tersebut sehingga untuk Perbandingan Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan / trend meningkat atau menurun tidak dapat dilihat. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya tidak dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2023		2024	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2		4	5	6	7	8
1.	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Rata-rata Nilai (Predikat) AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Predikat)			B (68,95)	97,11
2.		Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai			86,72	102,02
3.	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%			117,32	130,36
4.		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%			91,31	101,48
5.	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%			87,22	102,61
	JUMLAH						106,71

Sumber : Sasaran pada Dokumen Perjanjian Kinerja 2024.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Organisasi / Instansi Sejenis

Berikut tersaji perbandingan capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama / IKU yang selaras pada Organisasi / Instansi sejenis seperti Bappenas, Bappeda dan BappedaPropinsiKalimantanTimur, sebagai berikut

No	Organisasi/Instansi	Indikator Kinerja Sasaran/IKU	Realisasi Kinerja (%)
1	Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	73,28
2	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	76,05
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,17

Sumber : LkjIP Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2023, LkjIP Kota Balikpapan Tahun 2023

Dari perbandingan indikator kinerja utama di atas, keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan baik. Di Tingkat Propinsi keselarasan perencanaan pembangunan lebih menekankan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian target prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sendiri menggunakan pendekatan keduanya, yaitu dengan menetapkan indikator Tujuan Renstra yaitu Indeks Kualitas Perencanaan yang di dalamnya sudah secara komprehensif menggabungkan aspek keselarasan, konsistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

B.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2022-2026, untuk mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra 2026	Capaian Periode Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%	%	117,32	95	95
	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	%	91,31	95	95
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	87,22	100	100
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai (Predikat)AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (68,95)	A (90)	A
	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	86,72	95	95
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	.Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. %	94,07	1. 100	1. 100
	2. Nilai LPPD	2. Nilai LPPD dari KEMENPAN-RB	2. Nilai	2,77	2. 3,33	2. 3,33
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	110,42	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Survei	Angka	78,7	80	80

Sumber : 1. Renstra 2022-2026
2. Evaluasi Renja Tahun 2024

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sesuai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melalui indikator kinerja, terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan nilai rata – rata **106,71%**. Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai				BB (80)	B (68,95)	86,19
Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai				85	86,72	102,02
Rata Rata Capaian Kinerja							94,11

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat pada tahun 2023 untuk melakukan reviu terhadap Sasaran Kinerja beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Sekretariat Daerah, oleh karena itu pada tahun 2024 untuk Sasaran Kinerja dan beserta indikator kinerjanya mengalami perubahan menjadi **Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**, sehingga untuk capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak dapat di perbandingkan, untuk Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum** pada tahun 2024 sebesar **94,11 %**.

**Analisis Pencapaian Sasaran Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Angka	80	78,36	97,95
Rata Rata Capaian Kinerja				97,95

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar 97,95% dikategorikan Berhasil,.

**Tabel 3.8.2.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%				95	117,32	130,36
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%				95	91,31	101,46
Rata Rata Capaian Kinerja							115,91

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat pada tahun 2023 untuk melakukan reviu terhadap Sasaran Kinerja beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Sekretariat Daerah, oleh karena itu pada tahun 2024 untuk Sasaran Kinerja dan beserta indikator kerjanya mengalami perubahan menjadi **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**, sehingga untuk capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak dapat di perbandingkan, untuk Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra** pada tahun 2024 sebesar **115,91 %**.

Analisis Pencapaian Sasaran Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	Satuan	100	94,07	94,07
Nilai LPPD	Nilai	2,77	0	0
Rata Rata Capaian Kinerja				98,41

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** pada tahun 2024 sebesar 98,41% dikategorikan Berhasil, Untuk Nilai LPPD sejak tahun 2023 Kementerian Dalam negeri Belum Mengeluarkan Nilai.

Tabel 3.8.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%				85	87,22	102,61
Rata Rata Capaian Kinerja							102,61

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat pada tahun 2023 untuk melakukan reviu terhadap Sasaran Kinerja beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Sekretariat Daerah, oleh karena itu pada tahun 2024 untuk Sasaran Kinerja dan beserta indikator kerjanya mengalami perubahan menjadi **Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan**, sehingga untuk capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak dapat di perbandingkan, untuk Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan** pada tahun 2024 sebesar **102,61 %**.

Analisis Pencapaian Sasaran Program Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
	Target	Realisasi	
Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	110,42	110,42
Rata Rata Capaian Kinerja			110,42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Program Perekonomian dan Pembangunan**, pada tahun 2024 sebesar 110,42% dikategorikan Berhasil,.

Dalam melaksanakan kegiatan terdapat factor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian pekerjaan, adapun beberapa factor penghambat dan pendukung di beberapa bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikutnya.

Tabel 3.9
Faktor Penghambat dan Pendukung Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyelesaian dokumen RKA telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			Penyelesaian laporan capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2268	2268			pembayaran gaji & tunjangan secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang yang ditentukan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD telah terlaksana sesuai dengan target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Laporan keuangan akhir tahun SKPD telah terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Org/Bulan	28 Org/Bulan			pembayaran gaji & tunjangan KDH/WKDH secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Paket	8 Paket	Penyelesaian Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH beberapa ada yang belum dilaksanakan	Berkoordinasi mengenai kelengkapan atribut sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal	

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	1 Orang	Pelaksanaan Medical Check Up, menunggu dari permintaan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk fasilitasi Medical Check Up. (Pasif)	-Belum dapat dilaksanakan karena padatnya agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	
					- Masih menunggu Jadwal dri Bupati dan Wakil Bupati	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan			realisasi operasional kepala daerah & wakil kepala daerah telah terlaksana sesuai dengan permintaan kebutuhan kepala daerah & wakil kepala daerah
Fasilitasi Kerja sama Daerah	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	30 Dokumen	25 Dokumen			Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	30 Laporan	25 Laporan			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan sesuai target pada waktu yang telah ditentukan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	35 Dokumen	35 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	25 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	30 Dokumen	30 Dokumen			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	760 dokumen	946 Dokumen	Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 2.936.571, tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan waktu pengamprahan dan tingginya volume pekerjaan penyelesaian atas rancangan produk hukum yang harus ditetapkan sebelum akhir tahun 2023	Tahun 2024, kegiatan ini akan dibagi dalam dua tahap (per semester) sehingga anggaran dapat direalisasikan, mengantisipasi adanya perubahan jadwal pengusulan rancangan dari Kanwil Kemenkumham dan Biro Hukum Sekretariat Propinsi Kaltim.	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	4 Kasus			Bahwa kasus Hukum Yang ditangani oleh Bagian Hukum Tahun 2023 ada 4 Kasus dan Sudah ada Putusan dari Pengadilan
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 Dokumen	102 Dokumen			Realisasi Kinerja Telah Melebihi Target
Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	23 Dokumen	23 Dokumen			Penyusunan rancangan kebijakan sesuai usulan Perangkat Daerah dan diselesaikan tepat waktu
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	9 Dokumen			Penyelesaian dokumen penataan batas daerah, batas antar kecamatan dan rupa- rupa bumi dapat terselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Penyelesaian dokumen atau laporan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian laporan kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	20 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42 Laporan	42 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	20 Dokumen	20 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	25 Dokumen	25 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1705 Dokumen	2367 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	245 Dokumen	580 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang	12 Orang			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41 Dokumen	41 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	165 Dokumen	155 Dokumen	Ada beberapa pegawai yang mutasi / promosi keluar dari Sekretariat Daerah	Jumlah akan ditinjau Kembali sesuai dengan jumlah pegawai	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	131 Orang	Perubahan kebijakan aturan mengenal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	16 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket	17 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	18 Paket	Bersifat pasif dikarenakan menunggu permintaan	Pendataan peralatan rumah tangga yang akan disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30 Paket	23 Paket	Bersifat pasif dikarenakan menyesuaikan permintaan	Koordinasi pada pengguna Barang Cetak dan penyedia percetakan mengenai kebutuhan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	12 Unit	12 Unit			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	Pada Perubahan APBD 2023 tidak merubah target menjadi 0 didalam DPA Perubahan	Anggaran dialokasikan ke Kegiatan yang bersifat lebih urgent	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Laporan	15 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	20 Unit	Adanya tambahan pemeliharaan mobil Dinas Kepala Desa namun pada perubahan tidak mengubah target kinerja	Agar pada saat APBD Perubahan dapat mengingatkan kembali untuk perubahan target kinerja, bukan hanya perubahan anggaran	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	29 Unit	Adanya tambahan pemeliharaan mobil operasional namun pada perubahan tidak mengubah target kinerja	Agar pada saat APBD Perubahan dapat mengingatkan kembali untuk perubahan target kinerja, bukan hanya perubahan anggaran	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 Persen	100 Persen			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100 Persen	100 Persen			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100 Persen	100 Persen			

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 adalah sebesar **Rp.236.619.454.743,- (92,10%)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 256.384.931.909,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2024** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp.20.260.859.190,-**

Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser TA. 2024

URAIAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	TERTIMBANG (%)
BELANJA OPERASI	Rp 162.609.700.994,00	Rp 144.885.354.508,00	Rp 17.724.346.486,00	89,10
BELANJA PEGAWAI	Rp 34.752.691.311,00	Rp 31.681.043.344,00	Rp 3.071.647.967,00	91,16
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 111.220.106.683,00	Rp 97.077.408.164,00	Rp 14.142.698.519,00	87,28
BELANJA HIBAH	Rp 16.636.903.000,00	Rp 16.126.903.000,00	Rp 510.000.000,00	96,93
BELANJA MODAL	Rp 93.775.230.915,00	Rp 91.238.718.211,00	Rp 2.536.512.704,00	97,30
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp 91.743.997.355	Rp 89.261.748.211	Rp 2.482.249.144,00	97,29
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 1.495.013.560	Rp 1.483.970.000	Rp 11.043.560,00	99,26
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	Rp 536.220.000	Rp 493.000.000	Rp 43.220.000,00	91,94
JUMLAH	Rp 256.384.931.909,00	Rp 236.124.072.719,00	Rp 20.260.859.190,00	92,10

Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table halaman berikutnya.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TATA PEMERINTAHAN						
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.486.428.092	1.454.304.937	32.123.155	97,84	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	685.254.909	670.883.716	14.371.193	97,90	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	629.992.790	621.301.041	8.691.749	98,62	
	JUMLAH			2.801.675.791	2.746.489.694	55.186.097	98,03
	HUKUM						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	666.029.100	665.742.324	286.776	99,96	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	1.129.770.700	1.007.195.600	122.575.100	89,15	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.062.320	199.850.000	212.320	99,89	
	JUMLAH			1.995.862.120	1.872.787.924	123.074.196	93,83
	KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.799.195.501	18.218.960.970	1.580.234.531	92,02	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8.028.658.000	7.637.426.534	391.231.466	95,13	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	542.711.000	496.423.810	46.287.190	91,47	
	JUMLAH			28.370.564.501	26.352.811.314	2.017.753.187	92,89

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	KERJA SAMA					
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	319.223.000	317.620.464	1.602.536	99,50
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	297.386.469	296.963.420	423.049	99,86
	JUMLAH		616.609.469	614.583.884	2.025.585	99,67
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			33.784.711.881	31.586.672.816	2.198.039.065	93,49
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.293.525.189	1.215.672.709	77.852.480	93,98
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.644.866.704	1.305.433.394	339.433.310	79,36
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	779.486.795	632.005.454	147.481.341	81,08
	JUMLAH		3.717.878.688	3.153.111.557	564.767.131	84,81
	PEREKONOMIAN					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	347.943.400	339.817.200	8.126.200	97,66
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	293.294.518	292.841.265	453.253	99,85
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	293.294.518	293.244.557	49.961	99,98
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	105.019.158	103.311.288	1.707.870	98,37
	JUMLAH		1.039.551.594	1.029.214.310	10.337.284	99,01

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	367.724.840	357.141.906	10.582.934	97,12	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	269.433.759	261.468.678	7.965.081	97,04	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	649.261.300	627.792.914	21.468.386	96,69	
	JUMLAH			1.286.419.899	1.246.403.498	40.016.401	96,89
	SUMBER DAYA ALAM						
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	337.544.514	336.447.837	1.096.677	99,68	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	178.742.000	176.839.756	1.902.244	98,94	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	178.799.000	177.302.604	1.496.396	99,16	
	JUMLAH			695.085.514	690.590.197	4.495.317	99,35
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			6.738.935.695	6.119.319.562	619.616.133	90,81	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ORGANISASI						
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	453.115.894	451.549.358	1.566.536	99,65	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	251.670.976	234.059.226	17.611.750	93,00	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	755.923.827	637.301.473	118.622.354	84,31	
		Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	96.391.360	88.032.624	8.358.736	91,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	205.765.702	198.120.508	7.645.194	96,28	
	JUMLAH			1.762.867.759	1.609.063.189	153.804.570	91,28
	UMUM						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.640.000	194.655.590	2.984.410	98,49	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.468.000	129.510.371	52.957.629	70,98	
	JUMLAH			380.108.000	324.165.961	55.942.039	85,28

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	609.197.400	510.444.800	98.752.600	83,79
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.678.998.860	22.682.193.944	996.804.916	95,79
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.523.070.625	933.508.237	589.562.388	61,29
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.478.961.790	453.252.100	1.025.709.690	30,65
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.094.800	63.672.500	4.422.300	93,51
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.672.410.000	12.919.642.760	3.752.767.240	77,49
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.265.213.606	5.591.465.803	673.747.803	89,25
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	151.950.000	146.686.000	5.264.000	96,54
	JUMLAH		50.447.897.081	43.300.866.144	7.147.030.937	85,83
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.209.461.006	2.770.956.952	438.504.054	86,34
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.941.890.056	73.481.243.218	2.460.646.838	96,76
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.145.400.000	7.917.608.000	227.792.000	97,20
		JUMLAH	87.296.751.062	84.169.808.170	3.126.942.892	96,42

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.205.299.500	788.842.885	416.456.615	65,45	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.891.700.062	1.359.475.080	532.224.982	71,87	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.344.464.458	24.676.072.235	1.668.392.223	93,67	
	JUMLAH			29.441.464.020	26.824.390.200	2.617.073.820	91,11
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.405.072.454	1.182.477.266	222.595.188	84,16	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	950.636.864	844.188.241	106.448.623	88,80	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	305.938.600	238.601.860	67.336.740	77,99	
	JUMLAH			2.661.647.918	2.265.267.367	396.380.551	85,11
	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	2.757.891.129	2.637.761.523	120.129.606	95,64	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.830.157.068	1.815.710.130	14.446.938	99,21	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.383.741.469	2.280.232.373	103.509.096	95,66	
	JUMLAH			6.971.789.666	6.733.704.026	238.085.640	96,59
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	394.516.480	393.300.753	1.215.727	99,69	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	65.471.500	61.547.684	3.923.816	94,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.368.000	97.341.960	3.026.040	96,99	
	JUMLAH			560.355.980	552.190.397	8.165.583	98,54

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.084.901.311	30.547.370.450	2.537.530.861	92,33	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	563.766.242	510.825.513	52.940.729	90,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.425.000	18.418.280	6.720	99,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49.374.293	48.206.900	1.167.393	97,64	
	JUMLAH			33.716.466.846	31.124.821.143	2.591.645.703	92,31
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	650.000.000	175.162.894	474.837.106	26,95	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.121.936.001	724.448.600	397.487.401	64,57	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	66.692.250	183.307.750	26,68	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	547.500.000	52.500.000	91,25	
	JUMLAH			2.621.936.001	1.513.803.744	1.108.132.257	57,74
	JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			215.861.284.333	198.418.080.341	17.443.203.992	91,92
	TOTAL KESELURUHAN			256.384.931.909	236.124.072.719	20.260.859.190	92,10

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 (tiga) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3 (tiga) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran ***Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum telah mencapai kinerja sebanyak 102,02%*** namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **91,92%** dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran ***Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra, telah mencapai kinerja sebanyak 115,91%*** namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **93,49%** dari total anggaran yang dialokasikan. Dan pada Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran ***Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan 102,61%*** namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **90,81%**. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(≥ 100 %)		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan administrasi umum	102,02	91,92	10,10
2.	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	115,91	93,49	22,42
	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan			
3	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	102,61	93,49	9,12

E. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

E.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Paser terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai **68,95** dengan interpretasi predikat **Baik (B)**, maka pada tahun 2024 direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paser hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ;
2. Memasukan perbandingan capaian kinerja tahun evaluasi dengan capaian Renstra di Bab III LKjIP.
3. Memasukan Tindak Lanjut evaluasi LKjIP Tahun sebelumnya di Bab III.

E.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dalam hal kesesuaian dan keselarasan dokumen pohon kinerja, penjenjangan kinerja (cascading) telah menerapkan kerangka logis, dan potensi hubungan aktivitas kinerja antar bidang tugas/fungsi lain (crosscutting).
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Telah melakukan evaluasi internal berkala atau setiap 3 (tiga) bulan.
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Telah Menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh kepala bagian untuk mendokumentasikan sumber data kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan rencana aksi masing-masing.
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Telah mengkoordinir pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024 dengan melibatkan seluruh kepala bagian dan mendokumentasikan dokumen rapat dimaksud.
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Telah Menyusun pedoman dan mekanisme pemberian reward dan punishment atas kinerja pegawai yang ditetapkan dengan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2024 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis berada pada kategori **Berhasil dengan** nilai rata – rata **106,71%**.
2. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum** pada tahun 2024 sebesar **94,11 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini disebabkan karena dalam pengukuran kinerja Tahun 2024 telah menyelesaikan Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Indeks kepuasan layanan administrasi umum.
3. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra** pada tahun 2024 sebesar **115,91%** dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan karena pada 4 Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut ada beberapa yang dapat melebihi target, dalam penilaian LPPD Kabupaten Paser tahun 2022 memperoleh nilai 2,77 sedangkan tahun 2023 Nilai LLPD Belum Keluar dari Mendagri.
4. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan** pada tahun 2024 sebesar **102,61%** dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan dari total Hasil rapat koordinasi Konsultasi yang akan merumuskan kebijakan, sehingga dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi sebesar 87,22%.
5. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 adalah sebesar **Rp.236.124.072.719,- (92,10)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp.256.384.931.909,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2024** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp. 20.260.859.190,-**.
. Adanya Silpa ini disebabkan karena

penambahan alokasi anggaran untuk beberapa Sub Kegiatan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka disampaikan beberapa saran dan langkah sebagai berikut:

1. Hendaknya tersedia alokasi anggaran yang memadai sesuai kebutuhan sehingga seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.
2. Hendaknya dapat ditingkatkan fungsi koordinasi lintas Perangkat Daerah sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal
3. Hendaknya dilakukan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		K	RP	K	RP		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sekretariat Daerah				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	95,98%	Rp	95,98%	92,10%	Rp	
				256.384.931.909		59.355.271.534		Rp28.389.273.445		Rp40.085.609.508		Rp108.293.918.232		236.124.072.719		20.260.859.190	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	Persen	Rp 6.738.935.695		Rp 740.306.860		Rp 1.064.315.022		Rp 1.006.633.409		Rp 3.308.064.271	110,42%	Rp 6.119.319.562	110,42%	90,81%	Rp 619.616.133
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	153,96%	Rp	153,96%	84,81%	Rp	
				3.717.878.688		279.177.576		424.193.729		501.530.377		1.948.209.875		3.153.111.557		564.767.131	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	Persen	Rp 3.717.878.688		Rp 279.177.576	54,03	Rp 424.193.729		Rp 501.530.377		Rp 1.948.209.875	153,96%	Rp 3.153.111.557	153,96%	84,81%	Rp 564.767.131
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2200	Dokumen	Rp 1.293.525.189	205	Rp 141.664.808	53,50	Rp 251.482.400	1860	Rp 128.599.400	1474	Rp 693.926.101	4716	Rp 1.215.672.709	214,36%	93,98%	Rp 77.852.480
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247	Dokumen	Rp 1.644.866.704	141	Rp 83.412.768	33,60	Rp 93.812.533	35	Rp 269.035.807	23	Rp 859.172.232	282	Rp 1.305.433.340	114,17%	79,36%	Rp 339.433.364
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	Orang	Rp 779.486.795	5	Rp 54.100.000	75,00	Rp 78.898.796	2	Rp 103.895.170	0	Rp 395.111.542	16	Rp 632.005.508	133,33%	81,08%	Rp 147.481.287
Bagian Perekonomian				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	86,04%	Rp	86,04%	99,01%	Rp	
				1.039.551.594		182.912.018		99.951.481		73.587.707		672.763.104		1.029.214.310		10.337.284	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	Persen	Rp 1.039.551.594		Rp 182.912.018	25,00	Rp 99.951.481		Rp 73.587.707		Rp 672.763.104	86,04%	Rp 1.029.214.310	100,00%	99,01%	Rp 10.337.284
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24	Dokumen	Rp 347.943.400	2	Rp 35.120.685	4	Rp 40.037.430	10	Rp 30.786.400	8	Rp 233.872.685	24	Rp 339.817.200	100,00%	97,66%	Rp 8.126.200
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48	Laporan	Rp 293.294.518	8	Rp 90.744.149	15	Rp 28.074.000	16	Rp -	9	Rp 174.023.116	48	Rp 292.841.265	100,00	99,85%	Rp 453.253
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	32	Dokumen	Rp 293.294.518	4	Rp 30.832.784	18,75	Rp 19.840.051	22	Rp 32.001.307	0	Rp 210.570.415	32	Rp 293.244.557	100,00%	99,98%	Rp 49.961
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	30	Dokumen	Rp 105.019.158	6	Rp 26.214.400	10	Rp 12.000.000	10	Rp 10.800.000	4	Rp 54.296.888	30	Rp 103.311.288	100,00%	98,37%	Rp 1.707.870
Bagian Administrasi Pembangunan				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	100,00%	Rp	100,00%	96,89%	Rp	
				1.286.419.899		149.819.439		465.337.312		189.345.283		441.901.464		1.246.403.498		40.016.401	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	Persen	Rp 1.286.419.899		Rp 149.819.439	30,56	Rp 465.337.312		Rp 189.345.283		Rp 441.901.464	100,00%	Rp 1.246.403.498	100,00%	96,89%	Rp 40.016.401

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024			Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN
		KINERJA		RP	K	RP	TW II		TW III		TW IV		K	RP	K	RP	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	Rp 367.724.840	0	Rp 49.000.037	50,00	Rp 64.596.789	0	Rp 99.107.444	1	Rp 144.437.636	2	Rp 357.141.906	100,00%	97,12%	Rp 10.582.934
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	Rp 269.433.759	3	Rp 21.705.189	16,67	Rp 32.075.634	4	Rp 82.237.299	3	Rp 125.450.556	12	Rp 261.468.678	100,00%	97,04%	Rp 7.965.081
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	Rp 649.261.300	3	Rp 79.114.213	25,00	Rp 368.664.889	3	Rp 8.000.540	3	Rp 172.013.272	12	Rp 627.792.914	100,00%	96,69%	Rp 21.468.386
Bagian Sumber Daya Alam				Rp 695.085.514		Rp 128.397.827		Rp 74.832.500		Rp 242.170.042		Rp 245.189.828	101,67%	Rp 690.590.197	101,67%	99,35%	Rp 4.495.317
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Persen	Rp 695.085.514		Rp 128.397.827		Rp 74.832.500		Rp 242.170.042		Rp 245.189.828	101,67%	Rp 690.590.197	101,67%	99,35%	Rp 4.495.317
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	40	Dokumen	Rp 337.544.514	8	Rp 46.498.922		Rp 64.350.900	13	Rp 99.763.521	5	Rp 125.834.494	42	Rp 336.447.837	105,00%	99,68%	Rp 1.096.677
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	35	Dokumen	Rp 178.742.000	10	Rp 41.361.439		Rp 7.781.600	17	Rp 74.301.893	1	Rp 53.394.824	35	Rp 176.839.756	100,00%	98,94%	Rp 1.902.244
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	40	Dokumen	Rp 178.799.000	11	Rp 40.537.466		Rp 2.700.000	15	Rp 68.104.628	4	Rp 65.960.510	40	Rp 177.302.604	100,00%	99,16%	Rp 1.496.396
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti 2. Nilai LPPD	100 2,75	Persen Nilai	Rp 33.784.711.881		Rp 561.542.300		Rp 1.360.973.382		Rp14.637.991.001		Rp 15.026.166.133	94,07%	Rp 31.586.672.816	103,55%	93,49%	Rp 2.198.039.065
Bagian Tata Pemerintahan				Rp 2.801.675.791		Rp 160.926.776		Rp 268.384.078		Rp 740.374.677		Rp 1.576.804.163	100,00%	Rp 2.746.489.694	100,00%	98,03%	Rp 55.186.097
Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	Persen	Rp 2.801.675.791		Rp 160.926.776		Rp 268.384.078		Rp 740.374.677		Rp 1.576.804.163	100,00%	Rp 2.746.489.694	100,00%	98,03%	Rp 55.186.097
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	Dokumen	Rp 1.486.428.092	0	Rp 55.907.000		Rp 87.849.200	2	Rp 457.959.776	3	Rp 852.588.961	8	Rp 1.454.304.937	100,00%	97,84%	Rp 32.123.155
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	Dokumen	Rp 685.254.909	1	Rp 27.580.000		Rp 48.870.000	2	Rp 204.490.537	4	Rp 389.943.179	9	Rp 670.883.716	100,00%	97,90%	Rp 14.371.193
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	Rp 629.992.790	3	Rp 77.439.776		Rp 131.664.878	0	Rp 77.924.364	0	Rp 334.272.023	3	Rp 621.301.041	100,00%	98,62%	Rp 8.691.749

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		K	RP	K	RP		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bagian Hukum				Rp 1.995.862.120		Rp 141.115.435		Rp 64.282.336		Rp 372.784.802		Rp 1.294.605.351	76,33%	Rp 1.872.787.924	76,33%	93,83%	Rp 123.074.196
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	Persen	Rp 1.995.862.120		Rp 141.115.435		Rp 64.282.336		Rp 372.784.802		Rp 1.294.605.351	76,33%	Rp 1.872.787.924	76,33%	93,83%	Rp 123.074.196
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	750	dokumen	Rp 666.029.100	208	Rp 40.030.122		Rp 34.334.343	263	Rp 151.829.982	345	Rp 439.547.877	1076	Rp 665.742.324	143,47%	99,96%	Rp 286.776
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	Kasus	Rp 1.129.770.700	0	Rp 59.119.912		Rp 17.947.993	0	Rp 193.644.820	1	Rp 736.482.875	3	Rp 1.007.195.600	75,00%	89,15%	Rp 122.575.100
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	874	Dokumen	Rp 200.062.320	16	Rp 41.965.401		Rp 12.000.000	24	Rp 27.310.000	28	Rp 118.574.599	92	Rp 199.850.000	10,53%	99,89%	Rp 212.320
Bagian Kesejahteraan Rakyat				Rp 28.370.564.501		Rp 123.273.589		Rp 972.634.768		Rp Rp13.329.787.022		Rp 11.927.115.935	101,93%	Rp 26.352.811.314	101,93%	92,89%	Rp 2.017.753.187
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Money dalam menyusun Kebijakan	100	Persen	Rp 28.370.564.501		Rp 123.273.589		Rp 972.634.768		Rp Rp13.329.787.022		Rp 11.927.115.935	101,93%	Rp 26.352.811.314	101,93%	92,89%	Rp 2.017.753.187
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	Dokumen	Rp 19.799.195.501	2	Rp 9.375.000		Rp 835.083.494	27	Rp Rp11.513.279.422	183	Rp 5.861.223.054	273	Rp 18.218.960.970	76,47%	92,02%	Rp 1.580.234.531
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	Dokumen	Rp 8.028.658.000	1	Rp 18.875.879		Rp 66.431.574	42	Rp 1.722.623.000	52	Rp 5.829.496.081	96	Rp 7.637.426.534	96,00%	95,13%	Rp 391.231.466
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	Dokumen	Rp 542.711.000	6	Rp 95.022.710		Rp 71.119.700	4	Rp 93.884.600	3	Rp 236.396.800	20	Rp 496.423.810	133,33%	91,47%	Rp 46.287.190
Bagian Kerjasama				Rp 616.609.469		Rp 136.226.500		Rp 55.672.200		Rp 195.044.500		Rp 227.640.684	98,00%	Rp 614.583.884	98,00%	99,67%	Rp 2.025.585
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	Persen	Rp 616.609.469		Rp 136.226.500		Rp 55.672.200		Rp 195.044.500		Rp 227.640.684	98,00%	Rp 614.583.884	98,00%	99,67%	Rp 2.025.585
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dokumen	Rp 319.223.000	7	Rp 58.273.800		Rp 29.138.600	9	Rp 99.851.600	4	Rp 130.356.464	24	Rp 317.620.464	96,00%	99,50%	Rp 1.602.536
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Laporan	Rp 297.386.469	3	Rp 77.952.700		Rp 26.533.600	3	Rp 95.192.900	3	Rp 97.284.220	12	Rp 296.963.420	100,00%	99,86%	Rp 423.049
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	Nilai	Rp 215.861.284.333		Rp 58.053.422.374		Rp Rp25.963.985.041		Rp Rp24.440.985.098	76,66	Rp 89.959.687.828	91,43%	Rp 198.418.080.341	76,66	91,92%	Rp 17.443.203.992

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		K	RP	K	RP		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bagian Organisasi				Rp 1.762.867.759		Rp 156.793.348		Rp 294.902.174		Rp 349.826.949		Rp 807.540.718	100,00%	Rp 1.609.063.189	100,00%	Rp 91,28%	Rp 153.804.570
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	Persen	Rp 1.762.867.759		Rp 156.793.348		Rp 294.902.174		Rp 349.826.949		Rp 807.540.718	100,00%	Rp 1.609.063.189	100,00%	Rp 91,28%	Rp 153.804.570
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	Dokumen	Rp 453.115.894	4	Rp 72.459.933		Rp 65.899.768	13	Rp 153.590.185	9	Rp 159.599.472	41	Rp 451.549.358	100,00%	Rp 99,65%	Rp 1.566.536
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Laporan	Rp 251.670.976	0	Rp 55.283.258		Rp 60.297.908	1	Rp 51.908.300	0	Rp 66.569.760	4	Rp 234.059.226	100,00%	Rp 93,00%	Rp 17.611.750
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	Rp 755.923.827	0	Rp 29.050.157		Rp 53.754.487	0	Rp 38.133.143	1	Rp 516.363.686	2	Rp 637.301.473	100,00%	Rp 84,31%	Rp 118.622.354
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	Rp 96.391.360	0	Rp -		Rp 32.077.150	0	Rp 34.664.474	1	Rp 21.291.000	1	Rp 88.032.624	100,00%	Rp 91,33%	Rp 8.358.736
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Dokumen	Rp 205.765.702	1	Rp -		Rp 82.872.861	1	Rp 71.530.847	1	Rp 43.716.800	3	Rp 198.120.508	100,00%	Rp 96,28%	Rp 7.645.194
Bagian Umum				Rp 171.599.804.082		Rp 51.666.103.848		Rp12.991.631.240		Rp15.392.484.000		Rp 77.625.419.604	83,79%	Rp 157.675.638.692	87,80%	Rp 91,89%	Rp 13.924.165.390
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Rp 380.108.000		Rp 2.900.000		Rp 24.854.800		Rp 70.583.790		Rp 225.827.371	39,00%	Rp 324.165.961	39,00%	Rp 85,28%	Rp 55.942.039
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Dokumen	Rp 197.640.000	1	Rp 2.900.000		Rp 24.854.800	23	Rp 70.583.790	44	Rp 96.317.000	78	Rp 194.655.590	78,00%	Rp 98,49%	Rp 2.984.410
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Orang	Rp 182.468.000	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp 129.510.371	0	Rp 129.510.371	0,00%	Rp 70,98%	Rp 52.957.629
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	Rp 50.447.897.081		Rp 2.607.721.078		Rp 4.580.846.949		Rp 3.762.462.525		Rp 32.349.835.592	100,00%	Rp 43.300.866.144	100,00%	Rp 85,83%	Rp 7.147.030.937
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	Rp 609.197.400	1	Rp 14.996.100		Rp 22.365.900	1	Rp 30.494.800	12	Rp 442.588.000	16	Rp 510.444.800	100,00%	Rp 83,79%	Rp 98.752.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	Rp 23.678.998.860	5	Rp 547.733.900		Rp 1.585.677.200	5	Rp 332.317.300	5	Rp 20.216.465.544	17	Rp 22.682.193.944	100,00%	Rp 95,79%	Rp 996.804.916
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	Rp 1.523.070.625	1	Rp 17.760.000		Rp 87.837.260	7	Rp 189.893.268	12	Rp 638.017.709	25	Rp 933.508.237	100,00%	Rp 61,29%	Rp 589.562.388
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	Rp 1.478.961.790	2	Rp 23.100.000		Rp 159.520.600	13	Rp 121.513.200	10	Rp 149.118.300	30	Rp 453.252.100	100,00%	Rp 30,65%	Rp 1.025.709.690
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	Rp 68.094.800	0	Rp -		Rp 15.706.500	3	Rp 26.085.000	5	Rp 21.881.000	9	Rp 63.672.500	100,00%	Rp 93,51%	Rp 4.422.300
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	Laporan	Rp 16.672.410.000	9	Rp 1.146.964.451		Rp 1.879.886.852	11	Rp 2.065.503.391	120	Rp 7.827.288.066	150	Rp 12.919.642.760	100,00%	Rp 77,49%	Rp 3.752.767.240
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	Rp 6.265.213.606	6	Rp 857.166.627		Rp 829.852.637	20	Rp 996.655.566	118	Rp 2.907.790.973	150	Rp 5.591.465.803	100,00%	Rp 89,25%	Rp 673.747.803
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	Rp 151.950.000	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	12	Rp 146.686.000	12	Rp 146.686.000	100,00%	Rp 0,00%	Rp 5.264.000

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024			Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN
					TW I		TW II		TW III		TW IV		K		RP		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Rp 87.296.751.062		Rp 48.326.200.881		Rp 5.099.017.433		Rp 5.561.818.778		Rp 25.182.771.078	100,00%	Rp 84.169.808.170	100,00%	96,42%	Rp 3.126.942.892
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 3.209.461.006	3	Rp 778.348.071		Rp 639.017.433	3	Rp 703.119.470	3	Rp 650.471.978	12	Rp 2.770.956.952	100,00%	86,34%	Rp 438.504.054
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	Rp 75.941.890.056	1	Rp 46.191.876.810		Rp 2.426.036.000	2	Rp 2.824.735.308	0	Rp 22.038.595.100	5	Rp 73.481.243.218	100,00%	96,76%	Rp 2.460.646.838
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp 8.145.400.000	2	Rp 1.355.976.000		Rp 2.033.964.000	3	Rp 2.033.964.000	4	Rp 2.493.704.000	12	Rp 7.917.608.000	100,00%	97,20%	Rp 227.792.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	Rp 29.441.464.020		Rp 476.614.660		Rp 1.780.275.400		Rp 5.285.596.640		Rp 19.281.903.500	100,00%	Rp 26.824.390.200	100,00%	91,11%	Rp 2.617.073.820
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	Rp 1.205.299.500	2	Rp 73.300.000		Rp 233.272.500	0	Rp 167.282.185	0	Rp 314.988.200	3	Rp 788.842.885	100,00%	65,45%	Rp 416.456.615
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	Rp 1.891.700.062	2	Rp 98.434.150		Rp 407.838.500	9	Rp 305.295.580	6	Rp 547.906.850	20	Rp 1.359.475.080	100,00%	71,87%	Rp 532.224.982
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	Rp 26.344.464.458	1	Rp 304.880.510		Rp 1.139.164.400	0	Rp 4.813.018.875	0	Rp 18.419.008.450	3	Rp 24.676.072.235	100,00%	93,67%	Rp 1.668.392.223
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	Persen	Rp 2.661.647.918		Rp 220.432.377		Rp 1.074.739.686		Rp 661.094.841		Rp 309.000.463	100,00%	Rp 2.265.267.367	100,00%	85,11%	Rp 396.380.551
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 1.405.072.454	3	Rp 104.377.638		Rp 511.977.606	3	Rp 326.441.148	3	Rp 239.680.874	12	Rp 1.182.477.266	100,00%	84,16%	Rp 222.595.188
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 950.636.864	2	Rp 97.509.979		Rp 363.370.160	3	Rp 316.108.413	4	Rp 67.199.689	12	Rp 844.188.241	100,00%	88,80%	Rp 106.448.623
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	Paket	Rp 305.938.600	1	Rp 18.544.760		Rp 199.391.920	1	Rp 18.545.280	0	Rp 2.119.900	12	Rp 238.601.860	100,00%	77,99%	Rp 67.336.740
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	Persen	Rp 1.371.936.001		Rp 32.234.852		Rp 431.896.972		Rp 50.927.426		Rp 276.081.600	63,75%	Rp 791.140.850	63,75%	57,67%	Rp 580.795.151
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket	Rp 1.121.936.001	0	Rp -		Rp 428.054.000	1	Rp 20.313.000	6	Rp 276.081.600	9	Rp 724.448.600	90,00%	64,57%	Rp 397.467.401
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	Rp 250.000.000	1	Rp 32.234.852		Rp 3.842.972	1	Rp 30.614.426	0	Rp -	3	Rp 66.692.250	37,50%	26,68%	Rp 183.307.750

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024			Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN
					TW I		TW II		TW III		TW IV		K		RP		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp 6.971.789.666	Rp 842.261.021	Rp 1.328.606.965	Rp 1.608.263.174	Rp 2.954.572.866	100,00%	Rp 6.733.704.026	100,00%	96,59%	Rp 238.085.640				
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	Rp 6.971.789.666	Rp 842.261.021	Rp 1.328.606.965	Rp 1.608.263.174	Rp 2.954.572.866	100,00%	Rp 6.733.704.026	100,00%	96,59%	Rp 238.085.640				
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	Rp 2.757.891.129	Rp 396.688.723	Rp 593.735.701	Rp 715.249.693	Rp 933.867.536	12	Rp 2.639.541.653	100,00%	95,71%	Rp 118.349.476				
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	Rp 1.830.157.068	Rp 203.559.500	Rp 162.932.800	Rp 403.971.294	Rp 986.721.730	12	Rp 1.757.185.324	100,00%	96,01%	Rp 72.971.744				
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	Rp 2.383.741.469	Rp 242.012.798	Rp 571.938.464	Rp 489.042.187	Rp 1.033.983.600	12	Rp 2.336.977.049	100,00%	98,04%	Rp 46.764.420				
Bagian Perencanaan dan Keuangan				Rp 35.526.822.826	Rp 5.388.264.157	Rp 11.348.844.662	Rp 7.090.410.975	Rp 8.572.154.640	100,99%	Rp 32.399.674.434	100,99%	91,20%	Rp 3.127.148.392				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 560.355.980	Rp 56.119.600	Rp 153.560.667	Rp 113.116.050	Rp 229.394.080	100,00%	Rp 552.190.397	100,00%	98,54%	Rp 8.165.583				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	Rp 394.516.480	Rp 46.081.200	Rp 105.268.183	Rp 82.363.650	Rp 159.587.720	6	Rp 393.300.753	100,00%	99,69%	Rp 1.215.727				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	Rp 65.471.500	Rp -	Rp 23.081.684	Rp 1.275.000	Rp 37.191.000	12	Rp 61.547.684	100,00%	94,01%	Rp 3.923.816				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	Rp 100.368.000	Rp 10.038.400	Rp 25.210.800	Rp 29.477.400	Rp 32.615.360	5	Rp 97.341.960	100,00%	96,99%	Rp 3.026.040				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	Rp 33.716.466.846	Rp 5.207.132.721	Rp 11.041.609.809	Rp 6.670.088.889	Rp 8.205.989.724	98,82%	Rp 31.124.821.143	98,82%	92,31%	Rp 2.591.645.703				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	Org/Bulan	Rp 33.084.901.311	483 5.055.066.321	Rp 10.893.356.916	Rp 6.570.414.089	Rp 8.028.533.124	2120	Rp 30.547.370.450	93,47%	92,33%	Rp 2.537.530.861				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Lap	Rp 49.374.293	Rp 33.266.100	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 5.940.800	12	Rp 48.206.900	100,00%	97,64%	Rp 1.167.393				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950	Dokumen	Rp 563.766.242	186 118.800.300	Rp 134.006.093	Rp 95.174.800	Rp 162.844.320	967	Rp 510.825.513	101,79%	90,61%	Rp 52.940.729				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	Rp 18.425.000	Rp -	Rp 9.746.800	Rp -	Rp 8.671.480	2	Rp 18.418.280	100,00%	99,96%	Rp 6.720				

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Setelah Perubahan 2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Per Triwulan TA.2024		Realisasi Pagu TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		SISA ANGGARAN	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		K	RP	K	RP		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	Persen	Rp 1.250.000.000		Rp 125.011.836		Rp 153.674.186		Rp 307.206.036		Rp 136.770.836	104,17%	Rp 722.662.894	104,17%	57,81%	Rp 527.337.106
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Org/Bulan	Rp 650.000.000	6	Rp 37.011.836		Rp 63.674.186	6	Rp 37.206.036	12	Rp 37.270.836	28	Rp 175.162.894	100,00%	26,95%	Rp 474.837.106
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Org/Bulan	Rp 600.000.000	2	Rp 88.000.000		Rp 90.000.000	7	Rp 270.000.000	4	Rp 99.500.000	13	Rp 547.500.000	108,33%	91,25%	Rp 52.500.000

